

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan

A.1. Konsep atau pengertian Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Konsep dari Asas Peradilan Cepat, sederhana dan Biaya Ringan ini terbilang sangat penting Karena menurut Yahya Harahap, dalam konteks asas hukum peradilan, suatu asas hukum menjadi fundamen atau acuan umum bagi pengadilan dalam menyelesaikan perkara, sehingga putusan majelis hakim memiliki sendi dan norma yang kuat untuk mewujudkan tujuan hukum yang di maksud par apihak. Maka terdapat sejumlah asas hukum yang terkait dengan penyelenggaraan sidang peradilan, antara lain sebagai berikut:

1. Pradilan Seharusnya berkonsep Cepat, Sederhana dan biaya Ringan⁶
2. Pengadilan mengadili menurut persamaan di hadapan hukum.⁷
3. Pengadilan tidak bisa menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁸

⁶ Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, No. 157. Sekretariat Negara. Jakarta.

⁷ Pasal 5 ayat

⁸ Pasal 16 ayat

4. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.⁹

Asas Peradilan cepat , sederhana biaya ringan adalah sebuah asas yang sangat penting dalam sistem peradilan kita karena memuat point-point penting dalam penerapannya. Seperti yang di katakana oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo , S.H. dalam bukunya hukum acara perdata Indonesia Edisi ke-8 bahwa

“Yang di maksud sederhana aadalah acara yang jelas, mudah di fahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau di perlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik.”¹⁰

Sesuai dengan kutipan di atas Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo , S.H menegaskan terlalu banyaknya formalitas yang sulit di pahami dan menimbulkan banyak penafsiran akan menghambat jalannya untuk beracara sehingga ada rasa enggan hingga hilangnya kepercayaan.

Kata cepat menunjukan sebuah kepraktisan dalam peradilan , tak jarang ada perkarang yang selesai hingga bertahun-tahun terutama kasus Tindak Pidana korupsi, dalam hal ini cepat bukan hanya jalannya beracara pada pengadilan akan tetapi pengambilan keterangan-keterangan saksi dan bukti-bukti hingga penandatanganan putusan hakim juga terkadang berbetli-belit yang idealnya sebuah Peradilan bisa di selesaikan dengan masa tahanan percobaan 30 Hari sampai 60 hari masa

⁹ Pasal 19 ayat

¹⁰ Mertokusumo, 2009. *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty.

tahanan, terkadang bisa lebih dari itu, banyaknya faktor-faktor penghambat yang menciderai asa tersebut.

Biaya ringan, memberikan titik terang terhadap para pihak yang sedang beracara agar beban yang di bawa tidak terlalu berat sehingga bisa berfokus kepada akar rumput permasalahan, jika semisal biaya mahal di khawatirkan para pihak tidak tertarik atau enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada instansi pengadilan ataupun Kejaksaan.

A.2. Pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Asas peradilan cepat sederhana biaya ringan memiliki rumusan tentang asas tersebut, sederhana dan biaya ringan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi efektivitas dalam melakukan suatu acara peradilan. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa pengertian ”peradilan cepat” yang menjadi ukuran adalah waktu dalam sebuah peradilan. Proses peradilan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan didepan persidangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tegas disebutkan dalam hal

pembatasan jangka waktu penangkapan, yakni dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Selanjutnya tentang jangka waktu penahanan, Kitab Undang-Undang telah menetapkan jangka waktu penahanan beserta perpanjangan penahanan secara limitatif. Hal ini dapat dicermati dari ketentuan mengenai batas waktu penahanan dari seorang penyidik adalah 20 (dua puluh) hari. Penahanan ini dapat diperpanjang oleh penyidik ditambah 30 (tiga puluh) hari dengan izin dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Selanjutnya penuntut umum berwenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari yang bisa diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari, dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Selanjutnya hakim Pengadilan Negeri berwenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari, bisa diperpanjang 60 (enam puluh) hari dengan izin dari Ketua Pengadilan Tinggi. Kemudian Hakim Pengadilan Tinggi berwenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari, bisa diperpanjang 60 (enam puluh) hari dengan izin dari Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya Hakim Agung dapat melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari, bisa diperpanjang 50 (lima puluh) hari dengan izin dari Ketua Mahkamah Agung.

Asas peradilan cepat dapat juga dilihat dari ketentuan mengenai perintah yang ditujukan kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan pada saat segera sesudah menerima laporan dan pengaduan

tentang terjadinya tindak pidana. Selanjutnya dalam hal kondisi tertangkap tangan, penyelidik wajib segera melakukan berbagai tindakan yang diperlukan tanpa harus menunggu perintah dari penyidik. Hal ini mengingat tindakan dari penyelidik harus senantiasa dibawah perintah dan koordinasi dari penyidik. Ketentuan dari Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Pasal 102, adalah sebagai berikut; Penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan; Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Ayat (1) huruf b. Pasal tersebut menyatakan penyelidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

A.3. Pengaturan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam Undang-Undang Tipikor

Pelaksanaan peradilan pidana yang dilaksanakan dengan cepat sederhana dan biayaringan yang berarti menghindarkan segala hambatan yang bersifat prosedural agar tercapai efisiensi kinerja mulai dari pelaksanaan penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan akhir dapat selesai dalam jangka waktu yang relatif singkat dan menghindari birokrasi yang berbelit-belit.

Pada KUHAP mengatur tentang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan pada ranah peradilan Tipikor, adapun aturan-aturan KUHAP sebagai penjelasan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, anadlah :

1) Asas peradilan cepat:

- a. Tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan dari penyidik.
- b. Tersangka atau terdakwa berhak segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik.
- c. Tersangka atau terdakwa mempunyai hak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- d. Pelimpahan berkas perkara banding oleh pengadilan negeri ke pengadilan tinggi sudah dikirim 14 hari dari tanggal permohonan banding. (Pasal 326).

2) Asas Biaya Ringan dan sederhana:

- a. Penyatuan pemeriksaan peradilan tindak pidana dengan tanggungan ganti rugi secara perdata oleh korban atas kerugiannya kepada terdakwa.
- b. pembatasan penahanan dengan tuntutan ganti rugi.
- c. Banding tidak dapat diminta dalam perkara dengan acara cepat.

d. Menaruh asas deferensiaasi fungsional agar supaya perkara yang di handle oleh aparat hukum tidak terjadi tumpang tindih atau overlapping.

3) Asas Cepat, Sederhana dan biatya ringan,bahwa ada beberapa putusan dibawah ini yang tidak dapat diminta banding, dan ketentuan ini sangat menguntungkan terdakwa sekaligus merupakan acara yang sederhana, cepat dan biaya ringan. (Pasal 67). yakni

1. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum
2. Putusan bebas.
3. Putusan pengadilan dalam acara cepat.
4. Kurang tepatnya penerapan hukum.

B. Sistem Peradilan Tipikor

B.1. Sistem Peradilan Pidana

Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dilakukan dalam suatu sistem peradilan pidana (Criminal justice system). Sistem Peradilan Pidana atau Criminal Justice System kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan

sistem.¹¹ Sementara itu beberapa ahli berpendapat tentang sistem Peradilan Tindak Pidana di Indonesia:

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:

- Petunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- Petunjuk syarat umum yang harus di penuhi agar buaatan itu menjadi perbuatan yang membuatnya bisa dihukum pidana.

Pompe memberi membagi pengertian pidan jadi dua definisi, yaitu.

- a) Menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹²
- b) Menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Di bagian hukum formil, pada hukum acara pidana, Negara Indonesia merupakan salah satu bangsa yang mampu membuat klasifikasi peraturan

¹¹ Atmasasmita R. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta . Kencana Prenada Media Grup. hlm. 2

¹² ainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta.Sinar Grafika. Hal 225.

perundang-undangan hukum acara pidana yaitu dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Andi Hamzah mengatakan bahwa, sebagai organ pemerintah yang setingkat dengan Kementerian atau instansi nonKementerian dibawah Presiden. Sedangkan Kejaksaan mempunyai puncak kekuasaan pada Kejaksaan Agung, dimana Kejaksaan Agung merupakan organ Pemerintah yang berada di bawah Presiden dan merupakan lembaga nonKementerian. Dan Pengadilan masing-masing berdiri mandiri secara fungsional tetapi diarahkan oleh Mahkamah Agung. Serta Lembaga Pemasyarakatan yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM).

Terkait Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, masing-masing ahli hukum pun memiliki pendapat yang berbeda terkait komponen yang dapat dibebankan sebagai institusi aparat penegak hukum, dalam ranah hukum pidana. Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut maka komponen-komponen di dalamnya wajib untuk bekerja sama, terutama instansi-instansi (badan-badan) dikenal dengan :

1. Kepolisian (Polisi);
2. Kejaksaan (Jaksa) ;
3. Pengadilan (Hakim); dan
4. Lembaga Pemasyarakatan (Sipir).

Bahwa keempat instansi (badan) tersebut merupakan instansi yang masing-masing berdiri mandiri secara administratif. Dimana Kepolisian

“Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (herzeining).”¹³

B.1.2. Komponen atau Subsistem Dalam Peradilan Pidana

Pada Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana telah dijelaskan secara detail mengenai tugas-tugas dari mulai pihak kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum dan eksekusi putusan pengadilan dan hakim sebagai pemutus perkara pidana.

Oleh karenanya akan kita bahas satu per satu dari fungsi setiap Aparat Penegak Hukum (APH) sebagaimana terdapat pada KUHAP. Menurut M. Yahya Harahap,.

“Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (Integrated criminal justice system). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undangundang kepada masing-masing.”

¹³ Hamzah A. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

a. Instansi Kepolisian

Effendi Tollib menjelaskan, *“Kepolisian Indonesia mempunyai tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari public manakala terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.”*¹⁴ diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002

b. Instansi Kejaksaan

Kejaksaan memiliki tugas pokok meneliti kasus yang masuk untuk diajukan ke pengadilan atau tidak , mempersiapkan berkas perkara penuntutan, melaksanakan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.¹⁵ Kejaksaan sebagai suatu subsistem dari peradilan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, lalu Kejaksaan merupakan lembaga non departemen yang dipimpinnya dipegang oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab kepada Presiden.¹⁶

c. Instansi Pengadilan

¹⁴ Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana....,Op. Cit., hlm. 147–148

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Pengadilan mengemban tugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum (Jaksa) dan menurut Effendi Tholib, *“Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum dan menyiapkan arena public untuk persidangan sehingga public dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.”*¹⁷

d. LAPAS atau Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu lembaga terakhir yang berperan pada proses peradilan tindak pidana yang bertugas melaksanakan penahanan sesuai dengan perintah Pengadilan negeri setempat jika seseorang telah di jatuhi tuntutan

e. Advokat (Pengacara/Penasehat hukum)

Advokat adalah individu yang berprofesi memberi jasa pendampingan hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang sesuai dengan persyaratan atau ketentuan Undang – Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan pengacara berupa memberikan bantuan hukum, konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan melakukan landasan hukum dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang –

¹⁷ Ibid.

Undang tersebut,”yang menyebutkan bahwa: “ advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang – undangan.”

B.1.3. Asas-asas Peradilan dalam Hukum Acara Pidana

Asas merupakan sebuah pedoman utama dalam Hukum, ibarat sebuah pohon yang menjadi akar dari semua cabang-cabang hukum adalah asas, yang berarti asas sebagai poros atau filosofi yang mendasari hukum-hukum lainnya berkembang dan tetap menjaga koridor serta batasan-batasan yang ada pada hukum tersebut, ada banyak dikotomi hukum sesuai dengan bidang-bidangnya seperti hukum perdata, hukum tata Negara atau Hukum Pidana sekalipun yang menjadikan asas sebagai hal utama. Asas menurut KBBI adalah Prinsip.¹⁸

Asas hukum menurut ahli Theo Hijbers ada tiga macam yaitu :

1. “Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral. Prinsip-prinsip itu telah ada pada zaman pemikir zaman klasik dan abad pertengahan”.
2. Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional, yaitu prinsip-prinsip yang termasuk dari pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang bersifat rasional. Prinsip ini juga telah diterima sejak dahulu, tetapi baru di jelaskan secara nyata sejak dimulainya

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas. Diakses 20 September 2019

era modern, yakni sejak timbulnya negara-negara nasional dan hukum yang dibuat oleh kaum yuris secara profesional.”

3. Asas-asas hukum subjektif yang bersifat rasional maupun moral, yakni hak-hak yang ada pada manusia dan yang menjadi titik tolak pembentukan hukum.¹⁹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang perlindungan terhadap melindungi harkat serta martabat seorang manusia yang menjadi sebuah pedoman penting untuk melaksanakan suatu asas peradilan yang baik dan benar. Ada beberapa asas hukum yang menjadikan landasan atau suatu payung hukum yang menggerakkan peradilan antara lainnya adalah.

Asas-asas yang penting terdapat dalam Hukum Acara Pidana:

1. Asas Oportunitas

Asas Oportunitas adalah suatu hak yang dimiliki oleh penuntut umum untuk tidak menuntut ke Pengadilan atas seseorang, di Indonesia wewenang ini hanya diberikan pada kejaksaan (Pasal 6 butir a dan b serta Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP). Pasal 6 butir a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan:

- a) Jaksa adalah pejabat yang diberi tugas oleh undang-undang untuk bertindak menjadi penuntut umum serta melaksanakan

¹⁹ Ishaq, 2007. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b) Penuntut Umum adalah jaksa yang di beri tugas oleh undang-undang untuk melakukan penntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) menyebutkan:

Pasal 137

“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumannya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.

Pasal 138

(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

(2) Jika hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepaa penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari dari tanggal penerimaan berkas, penyidik harrus

sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Pasal 139 Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

2. Asas praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence)

Asas ini disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf c yang merumuskan: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

3. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum adalah asas yang memerintahkan agar dalam tahap pemeriksaan, pengadilan terbuka untuk umum maksudnya yaitu boleh disaksikan dan diikuti oleh siapapun, kecuali dalam perkara yang menyangkut kesusilaan dan perkara yang terdakwa anak-anak. Asas ini ada di dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang merumuskan sebagai berikut : “Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan

terbuka untuk umum, kecuali jika dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak di bawah umur.²⁰

4. Asas Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi

Asas ini juga terdapat dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 d. Pasal 9 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 yang juga mengatur ganti rugi. Secara rinci mengenai ganti rugi dan rehabilitasi diatur dalam pasal 95 sampai pasal 101 KUHAP.

Kepada siapa ganti rugi ditujukan, memang hal ini tidak diatur secara tegas dalam pasal-pasal KUHAP. Namun pada tanggal 1 Agustus 1983 dikeluarkan peraturan pelaksanaannya pada bab IV PP No. 27 / 1983.

Dengan peraturan ini ditegaskan bahwa ganti kerugian dibebankan kepada negara (departemen keuangan). Dengan tata cara pembayarannya Menteri keuangan juga mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 983 / KMK. 01 / 1983 pada tanggal 31 Desember 1983. Selain itu juga terdapat penggabungan pidana dengan ganti rugi yang terdapat dalam pasal 98 sampai pasal 101 KUHAP dalam macam macam hukum positif

5. Asas semua orang sama di muka hukum (equality before the law)

²⁰ A.Z Abidin Frid. 1981. *Sejarah dan Perkembangan Asas Opportunitas di Indonesia*. Ujung Pandang: UNHAS. Hlm. 12.

Asas ini menjelaskan tentang semua orang mempunyai hak yang sama di muka hukum tanpa memandang ras, Suku, atau agama yang memberi suatu keistimewaan kepada satu golongan saja, titik tekan pada asas ini adalah egalitarian yang setara.

a) Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjelaskan " Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

b) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Bahwa Indonesia sebagai negara hukum akan menempatkan warga negaranya setara atau sama kedudukannya di depan hukum.²¹

B.2. Peradilan Tindak Pidana Korupsi

B.2.1 Pengertian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi bisa di maknai suatu hal yang buruk dan kemunduran suatu masa , segala sesuatu yang bersumber dari kebobrokan tampuk kekuasaan akan menjadi mala petaka di suatu zaman. Sehingga, korupsi menunjukkan dua poros yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang di berikan public bukan untuk menjadi suatu solusi akan tetapi menjadi alat produksi sendiri..

Sementara itu di sisi lain korupsi bisa berarti tindakan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum

²¹ Haris Azhar.2018. *equality before the law dalam sistem peradilan di Indonesia*.
<https://lokataru.id> Di akses 8 Oktober 2019

terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi.²²

Berikut adalah pendapat tentang korupsi menurut berbagai tokoh

a. David H. Bayley

Korupsi sebuah “perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya, suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya.”²³

b. Syed Husein Alatas

Menurut pemaknaan umum, istilah “korupsi” pejabat, kita menyebut korup apabila seorang pegawai negeri (PNS) menerima pemberian yang diberikan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar diberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan tersebut. Terkadang perbuatan yang menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggiurkan juga tercakup dalam konsep itu, “lalu istilah pemerasan, yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, juga bisa dipandang sebagai “korupsi”. Istilah ini terkadang juga berlaku pada pejabat-pejabat yang menggunakan pendanaan publik yang

²² Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, h. 16-17.

²³ BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, Cet I, 1999, h. 257

mereka atur bagi keuntungan untuk mereka sendiri, artinya mereka yang bersalah melakukan penggelapan di luar harga yang ditentukan harus dibayar public”.²⁴

B.2.2. Komponen Dalam Peradilan Tindak Pidana korupsi

Pengadilan tindak pidana korupsi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang diatur pada Pasal 53 sampai dengan Pasal 62. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur tentang kekuasaan eksekutif akan tetapi di dalamnya mengatur kekuasaan yudikatif. Dalam pembentukan Pengadilan Tipikor, konsideran hukumnya tidak tertuju pada Pasal 24 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagai undang-undang organik dari UUD RI Tahun 1945 yang mengatur lebih lanjut penggunaan kekuasaan kehakiman.

Ketentuan yang mengatur pembentukan Pengadilan Tipikor yang ditempatkan sebagai suatu bagian dari lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut telah mempengaruhi kinerja pengadilan Tipikor yang harusnya menghukum terdakwa tindak pidana korupsi demi pemberantasan tindak pidana korupsi dan peran pengadilan Tipikor yang demikian ini tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan

²⁴ *Ibid*, h. 257-258

pengadilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan keadilan dan hukum.²⁵

“Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus di lingkungan pengadilan umum Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus diatur dalam Pasal 2 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum”.

“Berarti tidak ada lagi pengadilan umum atau khusus lain yang memiliki wewenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi selain pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 yang berada pada pengadilan umum”.

“Pengadilan Tipikor diberi kekuasaan untuk mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang pada asalnya dari Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan Pengadilan Khusus Tipikor di perluas bukan hanya berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi akan tetapi juga diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi”.²⁶

Sesuai dengan pengertian diatas dapat juga dimaknai bahwa peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia seharusnya merupakan kekuasaan peradilan yang bersumber dari kekuasaan negara hukum

²⁵ *Ibid Hal 6*

²⁶ *Ibid Hal 7*

Indonesia untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi guna menegakan hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Problem penegakan hukum di Indonesia yang sangat rentan mempengaruhi lambannya menuju kemajuan bangsa bisa jadi masalah pemberantasan tindak pidana korupsi dimana praktek korupsi ini sudah melembaga dan sistematis sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara yang begitu besar. Kasus korupsi tidak lagi hanya membutuhkan suatu upaya pencegahan tetapi sudah harus pemberantasan yang progresif karena hal itu sudah merajalela di Indonesia bahkan mengalir sampai jauh melintasi batas negara.

“Bukan isapan jempol lagi, praktek makelar peradilan dan berbagai bentuk . korupsi yang terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia justru menjadikan aparat penegak hukum sebagai bagian dari sebuah permasalahan, bukan bagian dalam memecahkan masalah pemberantasan korupsi di Indonesia”.

Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Menurut pasal 2 UU No. 46 Tahun 2009 tentang pengadilan Tindak Pidana korupsi , dan mengatur sebagian koridor dalam beracara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) adapun pasalnya sebagai berikut:

Pasal 3

“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan”.²⁷

Pasal 6

“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara”:

“tindak pidana korupsi tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi”.²⁸

Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Kekhususan hukum acara tersebut antara lain mengatur:

- a. penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- b. mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;

²⁷ Pasal 3

²⁸ Pasal 7

- c. jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;
- d. alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pada penjelasan berikutnya lembaga penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi

a. Polisi

Polisi adalah sebuah pelayan masyarakat yang mengayomi dan membantu menjaga ketertiban di lingkungan. Tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. “Dalam kaitannya dengan kasus korupsi polisi memiliki hak dalam penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan penyidikan. Selain itu polisi juga memiliki hak penyidikan”, “yaitu serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam

“pasal 14 UU No 2 Tahun 2002 yang berbunyi ”melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Selain itu kepolisian juga berwenang untuk menghentikan penyidikan sebagaimana yang di ungkapkan dalam pasal 16 bahwa” dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan”.

b. Kejaksaan

Pengertian dari maksud dasar yang terkandung di dalam “KUHP adalah penyidik utama adalah kepolisian”. “Tetapi dalam pasal 284 KUHP secara khusus memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk menyidik perkara tindak pidana khusus untuk sementara dimaksudkan mempersiapkan sumber daya manusia serta sarana di dalam kepolisian agar pada waktunya dirinya sudah memadai sebagai penyidik dan ada dua macam perkara pidana umumnya yang harus mengikuti ketentuan dalam KUHP untuk sementara”, pasal 284 ayat (2) menyebutkan : "Dalam jangka waktu dua tahun setelah aturan ini diundangkan, maka terdapat semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”, Lalu dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan, “yang dimaksud

dengan “ketentuan khusus acara pidana yang telah di sebutkan pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain :

“Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (undang-undang nomor 7 Drt Tahun 1995”).

29

“Undang-undang tentang pemberantasan Korupsi undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001, dengan catatan bahwa segala ketentuan khusus acara pidana sebagaimana telah di sebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu sesingkat-singkatnya”.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang berwenang melaksanakan tugas dan wewenangya bersifat “independen dan bebas lepas dari pengaruh kekuasaan manapun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Komisi pemberantasan korupsi mempunyai wewenang paying hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. “Untuk

²⁹ Pemerintah Indonesia. 1955. *Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi*. Lembaran Negara RI Tahun 1955. NO. 801. Sekretariat Negara. Jakarta

itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan”.

“Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 orang yang merangkap sebagai Anggota yang semuanya adalah pejabat Negara dan pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi”.

B.2.3. Asas dalam Peradilan Tipikor

Asas legalitas di atur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perUndang-Undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan” dalam bahasa Latin: *”Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”*, yang artinya harfiah dalam bahasa Indonesia dengan: *”Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”*. Sering juga dipakai istilah Latin: *”Nullum crimen sine*

lege stricta”, yang dapat diartikan dengan: ”Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”.

Hal ini sejalan dengan tindak pidana korupsi karena pada hakikatnya korupsi yang di kenal dengan kejahatan luarbiasa memberi hambatan baru bagi Negara untuk berkembang dan pelaksanaannya menggunakan asas legalitas ini sesungguhnya menjadikan sebuah delik yang perlu di patuhi oleh aparat maupun penegak hukum lainnya yang mana asa ini menjadi poros utama bagi peradilan tindak pidana korupsi..

Asas-asas tindak pidana korupsi lain yang terdapat dalam Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) nomor 8 tahun 2010 sebagai berikut

- 1.”Asas Lex Specialis, yaitu Undang-Undang TPPU ini merupakan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pencucian uang yang mempunyai peraturan tersendiri baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan serta pelaksanaan putusan dikerjakan sesuai dengan ketentuan dan aturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam perundangundangan ini”.
2. “Asas Presumption of guilty atau praduga bersalah (Pasal 35), yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang”

3. “Asas pembuktian terbalik (Pasal 77 dan 78 ayat (1) dan (2)), yakni terdakwa harus membuktikan asal usul harta atau kekayaan yang dimiliki untuk membuktikan kebenaran hartanya tersebut, tetapi melalui penetapan hakim dan yang wajib membuktikan kebenaran asal usul dana tersebut bukan Jaksa penuntut umum tetapi terdakwa sendiri, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses persidangan dan dikhawatirkan apabila JPU yang membuktikan dakwaan, alat bukti dihilangkan atau dirusak oleh terdakwa. Caranya dengan melalui penetapan hakim atau permintaan dari pihak jaksa kepada hakim untuk melaksanakan metode tersebut. Di pasal 78 tata caranya adalah hakim yang memerintah terdakwa untuk membuktikan itu” Penerapan pembuktian terbalik ini tidak bisa diterapkan dalam kasus korupsi murni, melainkan pada kasus korupsi yang memiliki unsur pidana pencucian uang. Jadi ini terkait dengan masalah tindak pidana pencucian uang.” Kalau semata-mata hanya masalah korupsi, kita tidak bisa menerapkan metode pembuktian terbalik, kita baru bisa menerapkan pembuktian terbalik apabila dakwaan nya adalah pencucian uang”